BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan

Langkah panjang masih harus ditempuh, namun kami tak pernah melupakan langkah awal yang mengantar pertumbuhan Bank BTPN hingga mencapai usia setengah abad di tahun 2008 ini.Bermula dengan berdirinya sebuah perkumpulan Bank Pegawai Pensiunan Militer (selanjutnya disebut BAPEMIL), di Bandung pada tahun 1959. BAPEMIL lahir sebagai brntuk kepedulian dari 7 (Tujuh) orang anggotanya pada kondisi para pensiunan TNI maupun pegawai sipil. Pendirian BAPEMIL sebagai sebuah badan usaha ini semakin dirasakan manfaatnya.

Sejalan dengan fungsi intermediasi perbankan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi,satu langkah maju lagi yang berhasil dicapai oleh Bank BTPN dalam era deregulasi 1983-1991. Tepatnya pada tahun 1986 Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui surat Keputusan Menteri Keuangan No.Kep-135/KM.11/1986 Tanggal 2 Desember 1986, Memberikan izin usaha kepada Bank BTPN untuk mrlakukan usaha sebagai Bank Tabungan.

Langkah Bank BTPN semakin Mantab. Pada tahun 1993, Bank BTPN berhasil memancangkan tonggak sejarah sebagai landasan untuk berpijak dan melangkahkan semakin maju. Melalui keputusan Menteri Keuangan KEP-055/KM.17+1993 Tanggal 22 Maret 1993 tentang izin usaha PT Bank Tabungan

Pensiunan Nasional (selanjutnya disebut Bank BTPN) di Bandung dan persetujuan Bank Indonesia No.26/5/UPBD/PBD2/Bd tanggal 22 April 1993,Bank BTPN mendapatkan izinuntuk melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum Non-Devisa.

Meskipun langkah semakin maju dengan menyandang status sebagai Bank Umum,namun Bank BTPN tetap teguh berpegang pada komitmen dan tidak melupakan semangat awal yaitu memberikan pelayanan yang terfokus bagi para pensiunan maupun pegawai aktif.

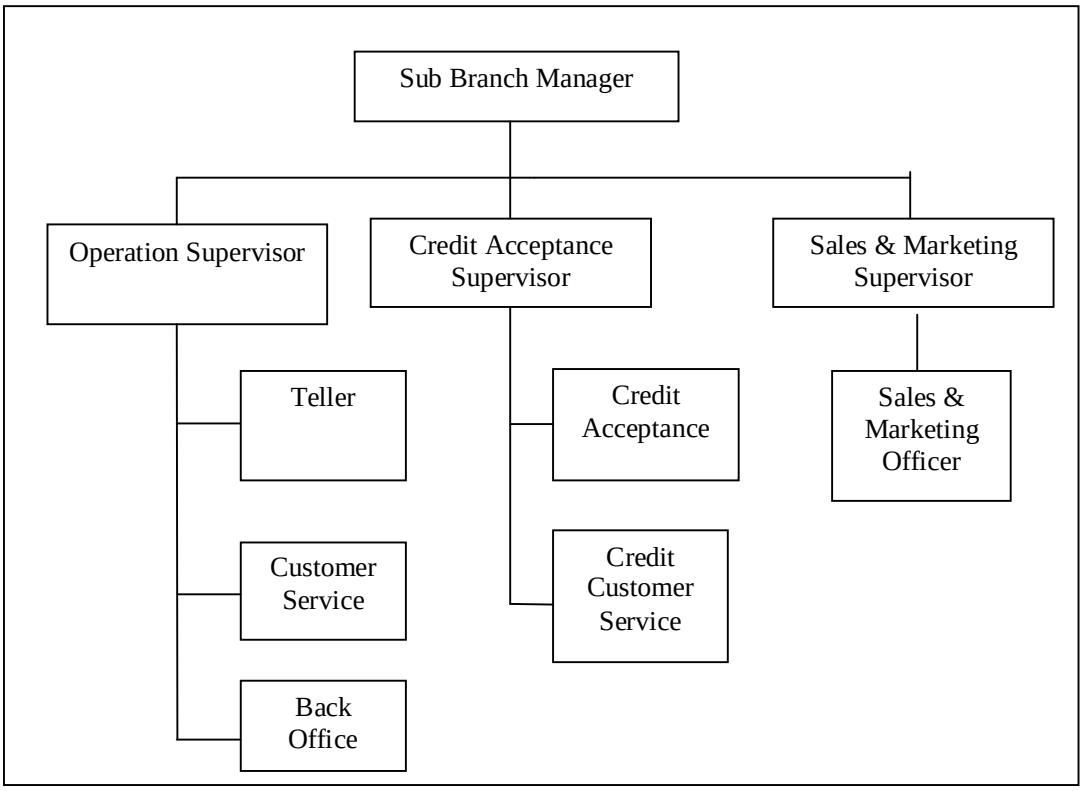
Berbagai tantangan telah dihadapi Bank BTPN dalam mengarungi perjalanan panjang pertumbuhan perbankan Indonesi. Sejak sebelun dan saat deregulasi perbankan digulirkan, dalam periode pertumbuhan ekonomi 1991-1995, bahkan saat krisis ekonomi melanda Indonesia 1997,hingga era pemulihan saat ini. Bank BTPN terus berupaya unuk bertahan, bangkit dan terus melangkah maju. Kini, memasuki usia separuh abad, langkah kami semakin tegak, untuk membangun Indonesia dengan penuh kepedulian.

4.1.2. Struktur Organisasi Pada PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) KCP Cikapundung Bandung.

Struktur organisasi merupakan bagian dari manajemen perusahaan. Dengan adanya struktur organisasi yang baik,maka akan memudahkan pemimpin dan para karyawan untuk mengetahui batas-batas tugas, wewenang dan tanggung jawab, serta hubungan kerja setiap personilnya.

Bentuk struktur organisasi BTPN (Tbk) adalah garis dan staf, dimana pimpinan berwenang memberikan tugas-tugas kepada bawahannya untuk semua bidang pekerjaan.

Struktur Organisasi BTPN Tbk.



Sumber : Bank Tabungan Pensiunan Nasional

Gambar 4.1

Struktur Organisasi BTPN Tbk.

4.1.3. Deskripsi Jabatan

Adapun uraian tugas pokok dari masing-masing jabatan adalah sebagai berikut :

1. Sub Branch Manager

Merupakan penanggung jawab semua kegiatan keuangan dan perbankan pada kantornya, dan juga menandatangani berkas nasabah yang mengajukan kredit yang telah disetujui sebelumnya.

2. Operation Supervisor

Mengawasi kegiatan operasional pada kantor cabang, seperti mengawasi karyawannya dalam melayani nasabah.

3. Teller

Bertugas di bagian depan sebuah bank yang pekerjaannya melayani transaksi keuangan nasabah seperti setor tunai, pengambilan tunai, print out, ataupun transaksi keuangan lainnya. Sering pula disebut ujung tombak dari sebuah bank karena berhadapan langsung dengan nasabah.

4. Customer Service

Bertugas untuk melayani pertanyaan ataupun keluhan-keluhan dari nasabah baik yang datang langsung maupun lewat telepon. Juga bertugas melayani orang yang akan membuka rekening di bank tersebut.

5. Back Office

Bertugas menganalisis dan mengelola berkas-berkas nasabah lalu memasukannya dalam database bank, juga bekerja sama dengan bagian kredit dalam menganalisa tingkat kelancaran pembayaran kredit nasabah.

6. Credit Customer Service

Tugas dan tanggung jawab credit customer service :

a. Membantu kepada bagian operasi dalam melaksanakan tugas, khususnya dibidang perkreditan.

b. Memberikan penjelasan yang diperlukan oleh calon nasabah.

c. Melaksanakan tugas-tugas penyaluran kredit.

d. Melaksanakan tugas-tugas rekening kredit

4.1.4 Aspek Kegiatan Perusahaan Dan Aktivitas Operasional Pada PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Bandung.

Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) dalam menjalankan usahanya memberikan pelayanan perbankan kepada masyarakat berupa simpanan, jasa-jasa perbankan dan pemberian fasilitas pinjaman antara lain:

1. Kegiatan Menghimpun Dana

a. Giro

Yaitu Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan.

b. Tabungan

1. Tabungan Citra

Yaitu jenis tabungan yang diperuntukan kepada masyarakat umum selama syarat-syarat dapat terpenuhi,adapun tahapan untuk membuka rekening yaitu :

. Mengisi formulir permohonan pembukaan rekening

a. Melakukan setoran awal sebesar Rp.50.000,-

b. Mengisi kartu contoh tanda tangan

c. Tabungan Citra Pensiun

Yaitu jenis tabungan yang diperuntukan kepada masyarakat pensiunan dengan melakukan tahapan yang sama dengan Tabungan Citra.

d. Tabungan Setara Deposito (TASETO)

Yaitu jenis tabungan yang jika nominalnya sudah diatas Rp100.000.000,- maka akan langsung diberikan bunga yang setara dengan bunga deposito (8%) dengan syarat dana tersebut harus diendapkan dahulu selama 1 bulan.TASETO diperuntukan bagi masyarakat umum.

e. Deposito

Yaitu jenis simpanan berjangka yang diperuntukan bagi masyarakat umum.

2. Pelayanan Jasa Bank

a) Transfer

Yaitu jasa pengiriman uang lewat bank baik dalam kota, luar kota atau keluar negeri

b) Kliring

Merupakan jasa penyelesaian hutang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikliringkan dilembaga kliring (penagihan warkat seperti cek atau BG yang berasal dari dalam kota)

c) Inkaso

Yaitu Penagihan kepada pihak yang wajib membayar (berhutang) berdasarkan warkat (cek, wesel, surat utang, dll) untuk kepentingan dan atas resiko pihak yang mempunyai tagihan.

d) Payroll Service

Yaitu layanan pengiriman gaji karyawan yang secara otomatis masuk ke rekening karyawan.

e) Pembayaran Uang Pensiun

f) Payment Point

Yaitu layanan untuk memudahkan dalam membayar tagihan rutin

g) Penerimaan Setoran Pajak

3. Pinjaman Yang Diberikan

a) Kredit Pensiun

b) Kredit Pegawai Aktif (PNS)

c) Kredit Deposan Bank BTPN

d) Kredit Untuk Kegiatan Usaha

e) Kredit Modal Kerja dan Investasi

4.2. Pembahasan Masalah

4.2.1 Pelaksanaan Pengawasan Kredit Di Bank Tabungan Pensiunan Nasional KCP Cikapundung Bandung

Secara spesifik pengertian pengawasan kredit selaras dengan pengertian pengawasan dalam arti luas yaitu salah satu fungsi manajemen dalam usahanya untuk penjagaan dan pengamanan dalam pengelolaan kekayaan bank dalam

bentuk perkreditan yang lebih baik dan efisien, guna menghindarkan terjadinya penyimpangan – penyimpangan dengan cara mendorong dipatuhinya kebijaksanaan-kebijaksanaan perkreditan yang telah ditetapkan serta mengusahakan penyusunan administrasi perkreditan yang benar.

Jadi pada tahap pertama pengawasan kredit ini merupakan upaya dalam penjagaan dan pengamanan harta bank dalam bentuk kredit , pengertian penjagaan disini lebih bersifat preventif. Seedangkan pengertian pengamanan disini bersifat represif, untuk menyelamatkan keemungkinan-kemungkinan kerugian yang potensil akan timbul lebih besar. Atau usaha represip ini kalau mampu untuk mencegah kerugian tersebut sama sekali, minimal harus meminimalisir kerugian yang akan timbul.

Pada tahap pertama disini fungsi pengawasan kredit lebih banyak mendekati fungsi polisionil yaitu dalam bentuk penjagaan dan pengamanan tersebut.

Pengawasan ganda (dua control) adalah pengawasan yang dilakukan oleh 2 orang pejabat yang berbeda fungsi, tahapan pemberian pinjaman yang mengandung kerawanan penyalah gunaan pinjaman dan atau pinjaman yang dapat menimbulkan kerugian bagi Bank.

Adapun pelaksanaan pengawasan kredit adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan pada tahap pendaftaran permohonan kredit.

a. Pendaftaran harus dilakukan oleh calon debitur sendiri. Hal ini harus diperhatikan untuk mencegah timbulnya penyimpangan yang merugikan Bank.

b. Pelayanan setiap pendaftaran pinjaman kredit harus dilakukan oleh bagian kredit setelah semua persyaratan dipenuhi oleh debitur.

2. Pengawasan pada tahap pemeriksaan permohonan kredit.

a. Setelah semua persyarat dipenuhi maka dokumen-dokumen tersebut diserahkan pada seksi analisa untuk dianalisis apakah kreditnya bisa dilanjutkan atau tidak.

b. Dokumen yang sudah dianalisis diberikan pada bagian kredit untuk melakukan tahap pemutusan pinjaman.

3. Pengawasan pada tahap pemutusan permohonan kredit

a. Kewajaran besarnya putusan pinjaman dikaitkan dengan besarnya usulan bagian kredit.

b. Kesesuian besarnya putusan pinjaman ditentukan oleh kepala bagian kredit.

4. Pengawsan sebelum pencairan

a. Kepala bagian kredit akan menyampaikan berkas-berkas kredit pada direktur.

b. Direktur akan menelaah dan akan meberikan keputusan apakah kreditnya dapat dicairkan atau tidak.

5. Pengawasan pada saat pencairan pinjaman

Teller memastikan bahwa :

a. Kuitansi pencairan pinjaman telah disetujui oleh direktur dan ditanda tangani oleh debitur.

b. Menjelaskan kepada debitur jumlah yang dibayar dan kewajibannya.

c. Pinjaman dibayarkan kepada debitur yang berhak.

6. Pengawasan setelah pencairan pinjaman

a. Bagian kredit akan melakukan kunjungan pada debitur mengenai kemajuan usaha debitur dan hasil dari pemeriksaannya akan ditulis didalam formulir.

b. Setelah bagian kredit melakukan kunjungan, bagian kredit akan melaporkan hasilnya kepada kepala bagian kredit.

c. Dan jika debitur mengalami masalah dan menyebabkan penungakkan maka bagian kredit akan melakukan kunjungan dan nasabah harus mengisi formulir yang diberikan petugas pengawas.

d. Setelah nasabah mengisi formulir maka bagian kredit akan memberikan hasilnya langsung kepada kepala bagian kredit.

Sesuai dengan peraturan yang ada, Bank Tabungan Pensiunan Nasional menerapkan fungsi pengawasan yang memadai pada setiap tahapan kegiatan pemberian pinjaman yang diatur sebagai berikut :

a. Setiap pejabat dibagian kredit baik secara langsung maupun tidak langsung, secara berkala wajib melakukan pengawasan terhadap bawahannya dalam melaksanakan proses pemberian pinjaman, sejak dari penetapan sampai dengan pelunasan pinjaman. Batas waktu setiap tahapan proses pemberian pinjaman sebagaimana telah diatur dalam perjanjian pencairan pinjaman.

b. Pengawasan juga dilakukan oleh kepala bagian kredit terhadap hasil kerja bawahannya.

c. Selanjutnya setiap 3 (tiga) bulan sekali kepala bagian wajib melaporkan secara tertulis disertai penjelasan-penjelasan kepada direktur mengenai kualitas pinjaman yang menjadi putusannya.

4.2.2 Upaya Bank Menghadapi Kredit Macet Di Bank Tabungan Pensiunan Nasional KCP Cikapundung Bandung

Pada dasarnya kredit macet merupakan kondisi yang seringkali terjadi pada bisnis perbankan yaitu sebagai resiko dari penyaluran kredit bank yang bersangkutan. Walaupun kredit macet seringkali sulit untuk kita hindarkan namun bank harus mengelolanya secara hati-hati dan sebisa mungkin diminimalkan resikonya sehingga dapat memberikan keuntungan bagi bank.

Perkembangan kredit di Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cikapundung Bandung tiap tahunnya selalu mengalami kenaikan, pada tahun 2007 jumlah kredit yang macet sebesar Rp.10.817, walaupun jumlah kredit yang diberikan pada tahun 2008 meningkat menjadi Rp.100.136 namun jumlah kredit yang mengalami kemacetan juga ikut meningkat menjadi Rp.14.696 , begitu juga yang terjadi pada tahun 2009 jumlah kredit yang diberikan bertambah menjadi Rp.100.548 , namun kredit macet yang di alami bank bertambah meningkat menjadi Rp.16.513 yang artinya jumlah kredit yang macet pada tahun 2008 sampai dengan 2009 mengalami kenaikan sekitar 12.36% .

Tabel 4.1

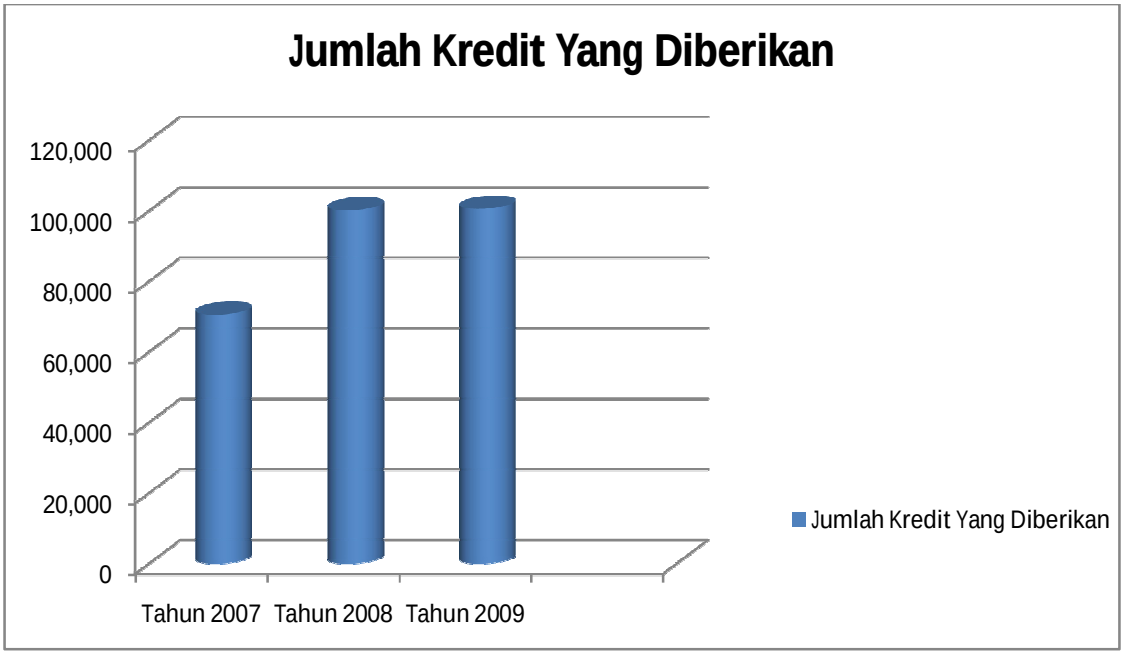
Perkembangan Pemberian Kredit Di Bank Tabungan Pensiunan Nasional

KCP Cikapundung Bandung (Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Jumlah
2007	70.573
2008	100.136
2009	100.548

Sumber : PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk)

Grafik 4.1
Diagram Perkembangan Pemberian Kredit



Tabel 4.2

Perkembangan kredit macet Di Bank Tabungan Pensiunan Nasional KCP Cikapundung Bandung (Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	**Jumlah**	**Fluktuasi**	
		Rp	(%)
2007	10.817	-	-
2008	14.696	3879	35.86
2009	16.513	1817	12.36

Sumber : PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk)

Dalam perhitungan fluktuasi dari tahun ketahun dapat digunakan rumus perkembangan dengan rumus sebagai berikut :

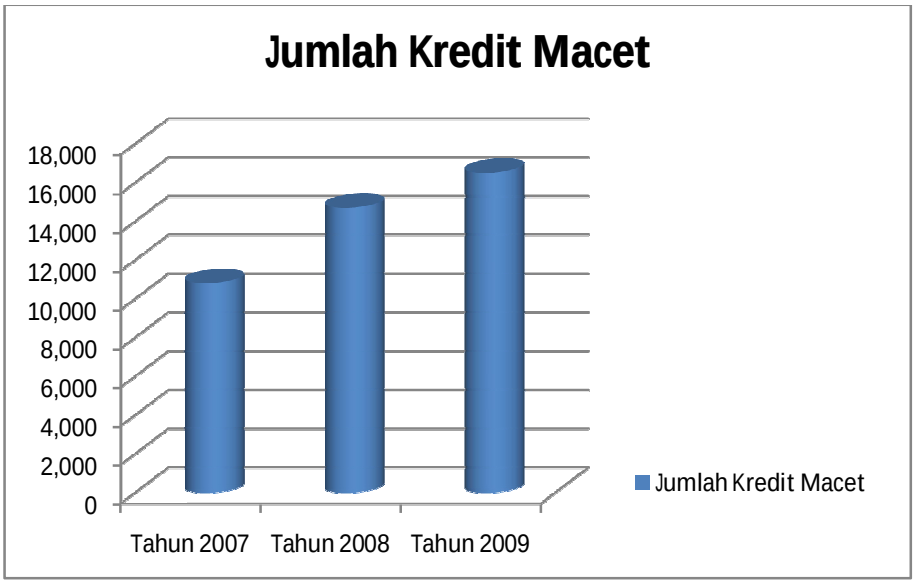
Perhitungan fluktuasi :

a. Rp. = jumlah kredit macet tahun n – jumlah kredit macet tahun n-1

b. $\% = \frac{Fluktuasi\ Rp\ tahun\ n}{Rp\ tahun\ n-1} \times 100\%$

Dari rumus di atas penulis dapat mengetahui seberapa besar perkembangan kredit macet yang di alami Bank tabungan Pensiunan Nasional KCP Cikapundung Bandung.

Grafik 4.2
Grafik perkembangan kredit macet



Setelah kita lihat perkembangan pada kredit macet diatas, dapat di lihat bahwa pada periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 kredit macet mengalami kenaikan.

Sepandai apapun analis kredit dalam menganalisis setiap permohonan kredit, kemungkinan kredit macet pasti ada, hal ini disebabkan oleh 2 unsur berikut.

1. Dari pihak perbankan

Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya. Dapat juuga terjadi

akibat kolusi dari pihak analis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisnya dilakukan secara subjektif.

2. Dari pihak nasabah

Dari pihak nasabah kemacetan kredit daapat dilakukan akibat dua hal yaitu:

a. Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan unntuk membayar.

b. Adanya unsur tidak sengaja. Artinya si debitur mau membayar, tetapi tidak mampu. sebagai contoh kredit yang di biayai mengalami musibah seperti kebakaran, kena hama, kebanjiran, dan sebagainya. Sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.

Menurut hasil wawancara kepada pihak Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cikapundung Bandung tentang pemberian kredit bahwa dalam pengembalian dana kredit sering terjadinya kredit macet yang disebabkan faktor-faktor diantaranya :

1. Sisi debitur antara lain :
    a. Itikad tidak baik dari debitur.
    b. Pengajuan berkas-berkas yang kurang.
    c. Pengelolaan usaha debitur tidak berjalan dengan baik.
    d. Penggunaan pinjaman tidak sesuia dengan tujuan semula.
2. Sisi Internal Bank, antara lain :
    a. Itikad kurang baik dari petugas Bank.

b. Ketidak mampuan petugas Bank dalam mengelola pemberian pinjaman mulai dari pengajuan permohonan sampai dengan pencairan pinjaman.
c. Kelemahan dan kurang efektifnya petugas Bank dalam membina debitur.
d. adanya hubungan keluarga antara pihak bank dan nasabah kredit dengan persyaratan dalam peminjaman dana yang kurang lengkap sehingga dapat menimbulkan kredit macet.

Dalam hal kredit macet pihak bank peerlu melakukan penyelamatan sehingga tidak akan mengalami kerugian. Penyelamatan yang dilakukan apakah dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi kredit terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar. Terhadap kredit yang mengalami kemacetan sebaiknya dilakukan penyelamatan sehingga bank tidak mengalami kerugian.

Upaya penyelesaian kredit macet atau bentuk penyelamatan terhadap kredit macet dapat dilakukan dengan cara antara lain :

a. *Rescheduling*

Tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran. Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit pembayaran kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi 1 tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama utuk mengembalikannya. Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayaranyapun missal 36 kali menjadi 48 kali dan hal itu tentu saja jumlah angsurannya pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

b. *Reconditioning*

maksudnya adalah bank mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti :

1. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok.

2. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. Dalam hal ini penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.

3. Penurunan suku bunga. Penurunan suku bunga dimaksudkan agar lebih meringgankan beban nasabah. Sebagai contoh jika bunga per tahun sebelumnya dibebankan 20 % per tahun diturunkan menjadi 18% per tahun. Hal ini tergantung dari pertimbangan bank yang bersangkutan. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.

4. Pembebasan bunga. Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah tidak mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

c. *Restructuring*

Restructuring merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak. Tindakan ini meliputi dengan menambah jumlah kredit yaitu menambah *equity* dengan menyetor uang tunai atau tambahan dari pemilik.

d. Kombinasi

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis di atas. Seorang nasabah dapat saja diselamatkan dengan kombinasi antara *Recheduling* dengan *Restructuring* misalnya jangka waktu diperpanjang pembayaran bunga ditunda atau *Reconditioning* dengan *Rescheduling* misalnya jangka waktu diperpanjang modal ditambah.

a. Penyitaan jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya etikad baik ataupun sudah sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya.